

# REVITALISASI KEBIJAKAN *FRONTIER* INDONESIA

Rahmah Daniah

*Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Mulawarman,  
E-mail: daniarahm@gmail.com*

## ABSTRACT

*Indonesia as maritime location, has very large size and fragmented island, the impact has higher frontier conflict with the other state. This paper to recommendation about frontier revitalization policy Indonesia, that is first, security geostrategic and frontier policy with humanist emotional approach and make 'informan sipil', second, geocultural approach with apply 'pass card' to outer territory society, third, geoeconomy approach to develop blue economy policy and ocean oriented,*

*Keyword: revitalization, policy, boundary and frontier*

## Pendahuluan

Persoalan perbatasan pulau-pulau terluar yang berkembang di Indonesia menjadi polemik yang cukup berkepanjangan, terutama ketika persoalan ini diangkat oleh berbagai pengkaji masalah perbatasan pulau-pulau terluar, maka pemerintah seolah tidak pernah melakukan apapun, padahal dikaji lebih mendalam maka persoalan menyangkut perbatasan sangat kompleks sekali, bahkan tuduhan pemerintah hanya membuat kebijakan 'halaman belakang' terhadap masalah perbatasan cukup 'nyaring' dilontarkan oleh beberapa kalangan pengkaji persoalan perbatasan ini, dikarenakan pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang muncul di daerah-daerah perbatasan. Padahal paska lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan, pemerintah memiliki respon positif, seperti membuat buku 'Manikam Biru Nusantara' yang berisi mengenai informasi tentang adanya 92 pulau terluar di Indonesia, tetapi ternyata respon ini tidak cukup memberikan masukan positif bagi persoalan ini.

Tindakan lainnya selain dari respon tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, seperti tercatat ada sekitar 92 pulau terluar wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi dan berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia (27 pulau), Filipina (11 pulau), India (6 pulau), Malaysia (17 pulau) Papua Nugini (1 pulau), Republik Palau (7 pulau), Singapura (4 pulau), Thailand (1 pulau), Timor Leste (6 pulau) dan Vietnam (3 pulau), sedangkan 9 pulau lainnya berbatasan dengan Samudera Hindia (Adiyanto: 2007). Hal ini menegaskan pemerintah memiliki perhatian terutama pada keberadaan pulau-pulau terluar yang memiliki potensi konflik

klaim oleh negara yang berbatasan langsung, hanya saja penerapan peraturan tersebut tidak mudah ketika bersinggungan dengan keterbatasan anggaran, kondisi luas geografi dan berhadapan dengan negara lain.

Permasalahan yang muncul mengenai keberadaan 92 pulau terluar di Indonesia beraneka ragam, mulai posisi geografis yang tumpang tindih, persoalan ekonomi ilegal, sosio kultur yang tumpang tindih dan lainnya antar negara yang berbatasan secara langsung. Tulisan ini melihat adanya beberapa persoalan yang muncul pada pulau-pulau terluar tersebut, yaitu *pertama*, persoalan abrasi pulau Nipah akibat reklamasi pantai Singapura, mengakibatkan pergeseran garis pantai Singapura maju 12 km dari hasil perjanjian 1973, posisi pulau Nipah sebagai titik dasar terluar antara kedua negara merupakan persoalan yang cukup signifikan, selain dilintasi sekitar 50.000 kapal dagang setiap tahunnya, keberadaan pulau Nipah juga dijadikan sebagai titik referensi yang dipergunakan dalam penarikan *median line* antara Indonesia dengan Singapura, posisi titik dasar ini menyebabkan perubahan penarikan titik dasar masing-masing pantai terluar yang berhubungan dengan *median line*, sehingga ketika terjadi pergeseran, maka terjadi pergeseran kedaulatan bagi sebuah negara.

*Kedua*, keberadaan pulau Miangas (Las Palmas) merupakan pulau terluar antara Indonesia dengan Filipina, yang memiliki jarak ke Filipina hanya 48 mil, sedangkan jarak yang ditempuh ke Indonesia sejauh 145 mil untuk sampai ke kabupaten Talaud bagian dari provinsi Sulawesi Utara (Pulau Terluar: 2013), persoalan yang muncul bukan dikarenakan pada jarak lintasan saja, tetapi telah menyebabkan perkawinan campuran antar penduduk di desa Miangas dengan masyarakat Filipina, serta perdagangan ekonomi yang menggunakan mata uang Peso Filipina bagi masyarakat kecamatan Nanusa, kebiasaan masyarakat selama bertahun-tahun yang memilih untuk melakukan transaksi dengan masyarakat Filipina cukup membahayakan kedaulatan Indonesia karena pilihannya, apabila melakukan transaksi perdagangan dengan Indonesia lebih mahal dan tidak sesuai dengan penghasilan mata pencaharian mereka.

*Ketiga*, keberadaan pulau Sebatik yang secara administratif dibagi oleh dua negara, bagian utara ditempati oleh Sabah, Malaysia, sedangkan bagian selatan ditempati oleh Kalimantan Utara, Indonesia, persoalan yang muncul pada pulau ini adalah perbandingan pembangunan yang kompleks sekali, terutama pada kecamatan Sebatik memiliki ketertinggalan infrastruktur (seperti pembangunan jalan, listrik, penggunaan air bersih) dan pembangunan ekonomi (pengadaan kebutuhan pokok yang lengkap dan murah). Perbatasan darat (*frontier*) secara langsung antara Indonesia dan Malaysia, menimbulkan persoalan seperti transaksi ekonomi yang ilegal guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di kecamatan Sebatik, tetapi kemudian berdampak pada persoalan kedaulatan, keamanan *boundaries* dan klaim wilayah Indonesia. Masyarakat kecamatan Sebatik dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, lebih memilih transaksi ke Tawau yang waktu jarak tempuhnya hanya 15 menit dari pelabuhan sungai Nyamuk daripada ke Tarakan dengan waktu jarak tempuh 1,5 jam.(Kompas.com)

Ketiga kasus diatas hanya sedikit bagian dari banyaknya persoalan yang terjadi pada pulau-pulau terluar Indonesia, sehingga lontaran mengenai kebijakan 'halaman belakang' cukup signifikan ketika melihat banyaknya potensi klaim kedaulatan pada

posisi *frontier* yang masih tidak mengalami perubahan positif dari pemerintah Indonesia, sikap radikal secara cepat harusnya dilakukan oleh pemerintah, apabila menginginkan 'lepasnya sipadan ligitan' tidak cepat terulang, artinya perlu adanya sebuah kebijakan revitalisasi keamanan maritim terutama pada permasalahan pulau-pulau terluar Indonesia, terutama bagaimana strategi pemerintah Indonesia mengelola *frontier* Indonesia yang berkenaan dengan persoalan pulau-pulau terluar, apakah persoalan *frontier* ini dapat menjadi kebijakan yang diprioritaskan atau tidak bagi sebuah negara.

### **Konsekuensi Wilayah Maritim Bagi Indonesia**

Indonesia sebagai *insular location* memiliki kontak dengan negara lain melalui jalur lautnya yang cukup terbuka dan strategis, yaitu menempati pada posisi silang antara samudera Pasifik dengan samudera Hindia dan lintasan perdagangan yang cukup padat antara benua Asia dan benua Australia, sebagai lokasi maritim tentunya letak Indonesia cukup potensial bagi jalur perdagangan yang berada pada posisi silang tersebut, posisi jalur ini melayani tingginya transaksi perdagangan antar negara yang menggunakan jalur laut, sekitar  $\pm 90.000$ /tahun terjadi lintasan perdagangan di jalur ini dan 80% menjadi jalur mengangkut 'perdagangan' minyak. (Connie: 2010)

Kondisi *insular location* biasanya digunakan bagi negara maju dengan membuat pelabuhan internasional, memiliki daya serap tinggi terhadap permintaan bongkar muat barang atau hanya sebagai nilai transit yang menghubungkan dengan pelabuhan berikutnya, tentunya posisi ini tidak dimiliki oleh semua negara karena posisi geografis berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga perlu adanya prioritas fasilitas pelabuhan internasional di wilayah ini untuk memberi nilai strategis pada *insular location*, tetapi juga perlu diwaspadai wilayah terbuka ini berdampak pada potensi keamanan laut, semakin terbuka maka akan semakin rawan akan kejahatan.

Keberadaan Indonesia sebagai negara maritim di Kawasan Asia Tenggara, terlihat dengan memiliki sekitar 17.499 pulau, dengan perbandingan yang memiliki nama sekitar 5.698 pulau dan sekitar 11.801 pulau tanpa nama, (*Forum for Strategic Studies*: 2012) sehingga potensi sumber daya alam kelautan yang besar dan luas mampu menjadi salah satu sumber devisa bagi negara maritim, tentunya dengan memperhatikan kemampuan pada pengelolaan perikanan dan sumber daya alam kelautan akan berbeda bagi masing-masing negara, apakah potensi kekayaan laut dapat dimaksimalkan atau tidak bagi pemasukan sebuah negara, biasanya wilayah maritim memberikan dampak pada budaya masyarakatnya, terlihat dari pola pertahanan hidup, seperti mencari makan, cara berinteraksi, berkomunikasi dan cara bertahan hidup, sampai pola kebiasaan masyarakat maritim.

Indonesia masuk dalam kategori '*very large size*' karena memiliki luas keseluruhan wilayah yurisdiksi mencapai  $\pm 7,8$  juta  $\text{km}^2$ , sepertiga dikuasai oleh luas perairan  $\pm 5,9$  juta  $\text{km}^2$ , angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masuk dalam kategori wilayah maritim yang sangat luas, apalagi memiliki garis pantai  $\pm 81.000$  km, sehingga menempati garis pantai yang panjang kedua setelah garis pantai Kanada. (*Forum for Strategic Studies*: 2012)

Keuntungan bagi negara yang memiliki luas yang besar, maka memiliki hasil sumber daya alam yang berlimpah dan memiliki tempat untuk hasil pertanian, kehutanan dan kekayaan hasil kelautan, tetapi hal ini juga mengakibatkan garis perbatasan wilayah keamanan bagi sebuah negara akan sangat luas untuk dikontrol dan diawasi oleh sistem pertahanan dan keamanan angkatan laut dan udara, bagi negara yang memiliki garis pantai yang luas, maka perlu pengontrolan yang ketat bagi kejahatan lintas batas dan masuknya musuh dari negara lain, sehingga kekuatan angkatan laut dan udara mampu mempertahankan garis pertahanan harus diperbesar dan diperkuat untuk mampu mengatasi dari segala ancaman di wilayah pantai.

Faktor geografi cukup menentukan kemampuan untuk mempertahankan garis pertahanan bagi negara yang memiliki wilayah sangat luas, termasuk mempengaruhi biaya pertahanan yang tinggi, apalagi Indonesia masuk dalam kategori maritim, sehingga akses keamanan cukup 'mahal' untuk mampu menjangkau setiap sudut wilayah terluar (*frontier*). Konsekuensi cukup tinggi untuk negara maritim adalah pola pertahanan dan keamanan lebih mengarah pada tingginya ancaman di wilayah perairan (kedaulatan, kesejahteraan, kejahatan lintas batas dan masalah penyeludupan), sehingga prioritas pengadaan alat untuk keamanan laut cukup 'menyedot' devisa bagi sebuah negara maritim.

Bentuk negara yang '*fragmented*' juga mengakibatkan wilayah ini rentan untuk terpisah bila satu wilayah dengan wilayah lainnya kurang mampu untuk integrasi secara penuh (berdaulat) atau memunculkan sikap nasionalisme yang cukup lama, sehingga kemampuan negara dalam mengelola wilayah ini harus mencapai titik kedaulatan antar wilayah yang terpisah ini tercapai. Persoalan pemerataan distribusi penduduk yang tidak merata, apalagi disebabkan oleh sumber daya alam dan fasilitas pembangunan yang berbeda bagi setiap wilayah, seringkali perbedaan yang sering muncul adalah potensi dari masing-masing wilayah cukup menyulitkan pemerataan pembangunan, pemicu lainnya adalah kemampuan hasil industri berbeda sehingga cukup alamiah distribusi penduduk terganggu dan selalu mengarah pada pola industri tersebut.

Konflik lainnya yang sering muncul adalah masalah kesenjangan pembangunan untuk wilayah yang *fragmented*, apalagi konsentrasi pembangunan hanya terpusat 'sentralistik' pada satu wilayah saja, terutama seringkali terlalu fokus pada keberadaan ibukota, kadang diakibatkan oleh sumber daya alam yang berbeda pada kemampuan potensial iklim masing-masing wilayah (seperti perbedaan sinar matahari sepanjang tahun dan tingkat curah hujan), disertai dukungan sumber daya manusia yang berbeda dalam mengelola potensinya, faktor lainnya adalah tingginya diversifikasi budaya dan tingkat pengetahuan yang berbeda, memang pembangunan ibukota sebagai '*core*' bagi negara sangat penting, karena sebagai pusat informasi, administrasi dan industri terjadi, tetapi ini menyebabkan ketimpangan dan konflik dengan wilayah lainnya. Akibatnya diversifikasi dan desentralisasi yang tinggi memicu kerentanan yang tinggi akibat tingginya kesenjangan pembangunan dan fasilitas yang dimiliki masing-masing wilayah, terutama negara yang memiliki wilayah *very large size* dan *fragmented*.

## Strategi Kebijakan Revitalisasi *Frontier* Bagi Indonesia

Perbatasan pada sebuah negara seringkali diartikan pada konsep *boundary* dan *frontier* yang memiliki pengertian berbeda, walaupun keduanya memiliki fungsi sama dalam menjaga ikatan kedaulatan sebuah negara. Perbatasan negara dianggap sebagai kedaulatan yang paling fundamental, memiliki tapal batas atau garis pemisah antara kedua negara, yang nampak secara fisik dan non fisik (berdasarkan perjanjian garis imajiner), (Hayati & Yani: 2007) sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka diijinkan bagi negara tersebut untuk mengerahkan kekuatan militernya untuk mengantisipasi musuh dari luar.

Konsep *boundary* diartikan sebagai garis-garis yang mendemarkasi batas-batas terluar dari wilayah suatu negara, *boundary* memiliki fungsi mengikat atau membatasi unit politik menjadi dalam satu kesatuan, sehingga seluruh wilayah yang terdapat didalamnya menjadi terikat dan berdaulat dalam satu kesatuan hukum bernegara, (Daldjoeny: 1991)

*Boundary* yang mengikat Indonesia menjadi negara kesatuan nusantara sebagai bagian dari kedaulatan yang diperintah oleh satu pemerintahan secara terpusat, sehingga seringkali *boundary* dianggap sebagai garis pemisah kedaulatan dengan negara lain, misalnya di Indonesia memiliki budaya (Melayu) yang mirip dengan Malaysia dan Brunei Darussalam, tetapi memiliki batas *boundary* (hukum dan pemerintahan yang berbeda) secara tegas membatasi wilayah kedaulatan secara administratif, walaupun satu daratan dengan negara Malaysia dan Brunei Darussalam.

Perbedaan dengan konsep *frontier* yaitu mewujudkan zona-zona (jalur) dengan lebar yang memisahkan dua wilayah yang berlainan negaranya, (Daldjoeny: 1991) *frontier* atau juga sering disebut dengan istilah *foreland* (di depan) adalah jalur (zona) terluar dari *boundary* suatu negara yang juga menyentuh *boundary* negara lain. Flint mengatakan *frontier* adalah wilayah terdepan dari sebuah negara yang berbahaya apabila diekspansi musuh terluar, sehingga seringkali disebut sebagai 'pertahanan terdepan' bagi sebuah negara, (Flint: 2007) wilayah terdepan ini sangat berkaitan erat dengan penarikan garis batas integrasi *boundary* yang mencakup komponen internal, seperti kewarganegaraan, keamanan dan potensi sumber daya alam.

Legitimasi kedaulatan bagi sebuah negara dalam geopolitik cukup penting dalam menunjukkan kekuatan sebuah negara, seperti kasus 'kekalahan' lepasnya sipadan ligitan berimbas pada masalah penarikan garis batas *boundary* Indonesia karena pulau sipadan ligitan merupakan pulau terluar yang berkorelasi dengan geostrategis dan geoekonomi suatu negara, munculnya masalah kedaulatan dan kewarganegaraan bagi penduduk yang berada dipulau tersebut, serta pengelolaan potensi sumber daya alamnya, secara fisik adanya ekspansi yang dilakukan oleh Malaysia melalui wilayah, secara non fisik adalah 'lepasnya' sipadan ligitan bagian dari lemahnya bentuk diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah. ( Djalal: 2009)

Perlunya sebuah revitalisasi kebijakan bagi pemerintah agar usaha menjadikan sebuah persoalan ini menjadi lebih penting, sebuah pemaknaan revitalisasi bukan hanya pada persoalan mana yang vital mana yang tidak, tetapi terjadi perubahan

pemaknaan bahwa kebijakan yang telah ada dapat diperkuat melalui pembaharuan usaha lain yang menopang usaha sebelumnya, seperti persoalan vitalnya nilai perbatasan bagi sebuah negara cukup rigid dalam bentuk '*nation state*' telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi lebih baik lagi melakukan pembaharuan strategis dalam menjaga kebijakan vital tersebut.

Ada tiga tawaran strategi revitalisasi dalam tulisan ini, *pertama* revitalisasi geostrategis dan politik perbatasan, Keamanan *frontier* jangan mengarah pada pengembangan fisik berorientasi pembangunan infrastruktur, tetapi berorientasi terutama pengembangan keamanan wilayah laut, seperti meningkatkan armada alutsista kekuatan angkatan laut yang disertai dengan dukungan armada dan alutsista dari angkatan udara, baik antara angkatan udara dan angkatan laut harus bersinergi dalam pengamanan batas terluar negara. Memang peningkatan alutsista yang ideal belum terjadi di wilayah perbatasan, karena akan 'menyedot' devisa sangat tinggi, tetapi dalam wilayah perbatasan personel angkatan darat dan udara tidak perlu banyak karena berbasis dengan alutsista yang digunakan, artinya pengiriman personel tidak perlu terlalu besar untuk *frontier*, karena ini yang menyebabkan tingginya 'devisa' ketidakmampuan pemerintah akibat pembiayaan akomodasi pengiriman dan kesejahteraan personel angkatan di wilayah perbatasan.

Idealnya keberadaan masyarakat di wilayah perbatasan tidak saja dianggap sebagai bagian '*de facto*' dari negara, sehingga pengembangan infrastruktur pembangunan kurang karena dianggap sebagai wilayah tertinggal, tetapi penting melakukan pelibatan masyarakat secara langsung dalam menjaga kedaulatan terutama untuk wilayah terluar, pelibatan mereka tentunya sebagai sarana informasi, apabila tentara yang dikirimkan ke wilayah musuh, maka keberadaan mereka dapat terdeteksi oleh musuh, sedangkan pengembangan potensi dari masyarakat sebagai pencari informasi karena keberadaan mereka sebagai masyarakat sipil, nilainya cukup 'murah' dan 'informan sipil' yang paling memahami keadaan negara dan keamanan negara tetangga karena mereka paling sering melakukan interaksi secara langsung, sehingga mereka dikembangkan dengan pengetahuan yang cukup untuk memahami masalah kedaulatan dan tidak menimbulkan gesekan dengan pihak lawan di wilayah *frontier*.

Pemerintah melakukan pengembangan pengetahuan masyarakat dalam mengelola potensi kelautan yang ada, pendekatan dengan mereka akan lebih '*humanist*' dalam arti sebenarnya daripada sekedar memberikan pasokan sembako saja. Revitalisasi fisik mulai ditinggalkan oleh negara maju, karena bagi mereka pendekatan ini tidak terlalu '*humanist*', anggapan mereka sekarang lebih mengedepankan revitalisasi non fisik yang karena pencapaiannya lebih komprehensif dan ideal, seperti untuk pulau terluar diperlukan pendekatan 'emosi' agar mereka merasa tidak saja merasa diakui '*de facto*' tetapi sebagai bagian dari kesatuan wilayah Indonesia seutuhnya.

Selain pemanfaatan masyarakat sipil sebagai informan, hendaknya posisi silang di antara dua Benua dan Samudera tersebut memberikan keuntungan pelayaran terbuka dalam hal transportasi laut dengan negara-negara lain, posisi ini juga mengakibatkan Indonesia bersinggungan dengan banyak negara secara langsung, hasilnya posisi terbuka ini selain menguntungkan, seperti yang disebutkan di atas juga

merugikan karena tingginya tingkat kejahatan dengan negara lain, sehingga Indonesia perlu melakukan hubungan yang baik dengan negara-negara lain yang berbatasan secara langsung, seperti mengadakan berbagai kerjasama keamanan perbatasan dengan negara-negara tersebut, sehingga kerangka kerjasama ini memberikan masukan positif, informasi, pengetahuan dan teknologi keamanan perbatasan dari hasil masukan positif ini cukup 'murah' dari sisi ekonomi karena pemerintah tidak menanggung biaya pengawasan keamanan perbatasan secara keseluruhan.

*Kedua*, mengupayakan pendekatan geocultural yaitu permasalahan *frontier* yang sering dipahami oleh pemerintah adalah menyelesaikan wilayah pulau yang dianggap terisolir, dikarenakan ketidakmampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya, padahal masyarakat maritim mampu bertahan dan beradaptasi 'kebiasaan' dan budaya maritim dengan baik secara turun temurun, hanya saja mereka tidak mampu memaknai kedaulatan secara utuh dan rigid. Kasus tingginya perdagangan antara masyarakat Sebatik dengan Tawau dan transaksi masyarakat Miangas dengan Filipina menggunakan mata uang peso, sebagai hasil dari sebuah perbedaan pandangan, masalah ini muncul seperti telah melanggar masalah kedaulatan oleh pandangan '*nation state*', padahal melalui individu yang berada pada pulau terluar adalah melihat ini lebih kepada kepentingan keuntungan 'ekonomis' untuk mampu bertahan hidup, contoh kasus yang sering terjadi adalah tingginya pencurian ikan ilegal di wilayah perbatasan (pandangan *nation state*), sedangkan pandangan masyarakat perbatasan hal ini sekedar dari upaya bertahan hidup.

Kajian revitalisasi pada persoalan diatas adalah tidak hanya melihat pada sudut pandang tertentu saja, perlu pemaknaan menyeluruh untuk persoalan kesenjangan pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di pulau terluar, penyelesaiannya tidak hanya peningkatan pengiriman barang sembako dan pembangunan fisik sebagai peningkatan nilai kesejahteraan mereka, tetapi mengelola 'ideologi' pandangan kedaulatan dalam arti sesungguhnya. Masyarakat di wilayah perbatasan yang telah terbiasa dengan budaya maritim 'ketimurannya' hendaknya perlu pembinaan yang lebih intensif, sehingga pendekatan humanist di wilayah perbatasan lebih vital pada menjaga kelestarian budaya tersebut dengan baik, agar tercipta 'emosi' mereka adalah bagian dari Indonesia sendiri, melalui pengakuan budaya keseharian mereka adalah bagian dari hasil keanekaragaman bangsa.

Pemberlakuan '*pass card*' untuk interaksi masyarakat di pulau terluar cukup penting supaya memudahkan transaksi setiap harinya agar mampu bertahan hidup, memiliki nilai ekonomis dan efisien daripada mengharuskan mereka menempuh jarak dan biaya yang besar ke *boundaries* sendiri. Beberapa pulau di Indonesia telah diberlakukan, hanya saja perlu pembinaan secara komprehensif dalam menggunakan kartu tersebut bagi kedaulatan sebuah negara, mereka diberikan pengetahuan dan informasi yang baik akan pentingnya kedaulatan bagi sebuah negara yang memiliki *insular location* dan *fragmented*, hal ini penting agar nilai kedaulatan tidak terkikis begitu saja terutama pada adanya penetrasi budaya asing terhadap masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia yang telah terbiasa berinteraksi dengan masyarakat dari negara lain.

*Ketiga*, pendekatan geoekonomi melalui kesejahteraan pemerintah kepada masyarakat pulau terluar, menitikberatkan pada bantuan sembako dan subsidi yang

biasanya hanya mampu bertahan sekitar beberapa bulan saja, belum lagi akomodasi bantuan berhadapan dengan masalah iklim atau gelombang tinggi, membuat mereka harus menunggu pasokan sembako lebih lama lagi, Idealnya perlu pembenahan secara total terutama cara mereka mengembangkan potensi '*blue economy*' untuk mampu bertahan hidup lebih lama 'permanen' daripada sekedar memberikan bantuan.

Pengetahuan dalam pengelolaan '*blue economy*' yang diberikan oleh pemerintah akan mudah diadopsi oleh masyarakat pesisir, hanya saja kebijakan '*grass root*' pada masyarakat pesisir secara langsung dalam pengelolaannya sangat penting dan mengarah pada jangka panjang, tetapi kebijakan pengelolaan hayati laut juga mendapat dukungan khusus dari kolaborasi antar kelompok pemerintah, kelompok akademis dan kelompok bisnis terlibat dalam pengembangannya, artinya peran kolaborasi dari pemerintah daerah yang jangkauannya paling dekat dengan wilayah perbatasan memberikan pengayoman dan perhatian tinggi, sedangkan posisi kelompok bisnis dalam menerapkan kebijakan diatas adalah memberikan fasilitas untuk kemampuan peningkatan perdagangan dengan mengusahakan potensi kelautan diwilayah tersebut.

Strategi geoekonomi sudah cukup lama dikembangkan oleh beberapa negara maritim, seperti Indonesia yang 2/3 wilayahnya adalah perairan, seharusnya potensi akan hayati laut menjadi prioritas utama pengembangan wilayah maritim karena mampu memberikan masukan pada devisa negara, selain itu negara maritim bisa lebih sejahtera dengan kekayaan hayati laut yang tidak perlu dikelola karena terbentuk oleh kondisi geografis secara alami, revitalisasi pengembangan kekayaan hayati laut tidak hanya berdasarkan jumlah dari ekspor perikanan saja, tetapi sekarang lebih pada prioritas pengelolaan potensi kelautan yang komprehensif, terutama pada industri bioteknologi kelautan, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut dalam dan industri kemaritiman.

Menggunakan '*ocean oriented*' bagi sebuah Indonesia tentunya tidak saja pada hasil penangkapan ikan sebagai salah satu penghasil masyarakat maritim, tetapi mampu membuat sebuah kegiatan industri ekonomi yang mapan dan memberikan nilai devisa besar sebagai dasar keuntungan negara yang memiliki wilayah perairan sangat luas, seperti membangun infrastruktur dan fasilitas dengan kerangka disain pembangunan yang mengikuti kondisi alam setempat, hasilnya selama ini memang berbeda terutama prioritas pembangunan pada pulau besar yang daratannya lebih besar yang jumlahnya lebih sedikit, daripada pengelolaan pembangunan di pulau-pulau terluar yang lebih sempit dan memiliki jumlah penduduk sedikit dan jumlahnya lebih banyak, agar nilai sebuah integrasi dan nasionalisme lebih tercapai dengan kondisi geografi seperti ini.

## **Kesimpulan**

Persoalan perbatasan pulau-pulau terluar cukup intens terjadi, seperti klaim batas wilayah, ilegal transaksi perdagangan dan berbagai kejahatan transnasional, hal ini juga dipicu terutama masyarakat banyak yang menilai pemerintah membuat kebijakan 'halaman belakang' untuk masalah ini, padahal ini juga tidak terlepas dikarenakan konsekuensi keberadaan Indonesia dengan memiliki lokasi maritim, luas

yang sangat besar dan bentuk yang terpisah atas pulau-pulau, mengakibatkan tingginya konflik akibat wilayah yang mengarah pada rendahnya pembentukan integrasi dan nasionalisme.

Tawaran dari tulisan ini ada tiga hal, yaitu berkaitan dengan adanya strategi kebijakan revitalisasi *frontier*, dengan menggunakan pendekatan geostrategi, geocultural dan geoekonomi dengan kajian lebih menentukan prioritas utama, yaitu dengan harapan agar lebih ekonomis, sejahtera dan *humanist* terutama pada masyarakat yang berada di pulau terluar.

## Referensi

- Adiyanto, Endang, Ety Eidman dan Luky Adrianto, 'Tinjauan Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia (Studi Kasus Pulau Nipa)', *Buletin Ekonomi Perikanan*, Vol.VII No.2 Tahun 2007
- Bakrie, Connie Rahakundini, "Strategi Pertahanan Negeri Maritim & Tegaknya Kedaulatan NKRI", Universitas Indonesia – Maritim Institute, Balai Kartini, 07 Oktober 2010, dalam <http://www.indomaritimeinstitute.org/wp-content/uploads/2010/10/Connie-Rahakundini-1.pdf>
- Department Pertahanan Republik Indonesia, 2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia
- Daldjoeni, 1991, *Dasar – Dasar Geografi Politik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djalal, Hasyim, 2009, "Mengelola Potensi Laut Indonesia", makalah yang dipresentasikan dalam Stadium General: Border Diplomacy dalam Kerangka NKRI, Jurusan Hubungan Internasional, UIN Jakarta
- Dua Sisi Sebatik, dalam [www.kompas.com/read/2011/08/08/04132321/Dua.Sisi.Sebatik](http://www.kompas.com/read/2011/08/08/04132321/Dua.Sisi.Sebatik)
- Flint, Colin, 2007, *Introduction to Geopolitics*, Routledge, London and New York
- Hayati, Sri dan Ahmad Yani, 2007, *Geografi Politik*, Refika Aditama, Bandung
- Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan NKRI, JURNAL KAJIAN LEMHANNAS RI, Edisi 14, Desember 2012, dalam <http://www.lemhannas.go.id/portal/image/stories/humas/jurnal/jurnal-hankam.pdf>
- Pulau-Pulau Terluar NKRI, dalam <http://themyfo.blogspot.com/2010/10/12-pulau-terluar-terdepan-indonesia.html>
- Sea Power, *Forum For Strategic Studies, Discussion and Awareness of Maritime Issues, Strategy and the Role of Maritime Forces in the Security of National Interests*, 2012. dalam <http://seapower-indonesia.blogspot.com>
- Siambo, Marhaeni Ria, 2010, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta